



**PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jln. Urip Sumoharjo No. 15
Luwuk : 94711

Website : www.diskominfo.banggaikab.go.id
Email : diskominfo@banggaikab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANGGAI SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 500.12.18.1/352/Bid.PIP/DKISP
TENTANG**

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai perlu menetapkan Pengklasifikasian Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa penetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai perlu ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Banggai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang atas Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2670);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025.
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri atas:
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 28 Juli 2025.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kabupaten
Banggai



LESMAHA P. KULAB

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19810721 200312 1 004

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab	Waktu
1.	Jumlah keseluruhan bangunan gedung paud yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan	2025
2.	Jumlah bangunan gedung pendidikan nonformal/kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan	2025
3.	Jumlah Keseluruhan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan nonformal	Dinas Pendidikan	2025
4.	Jumlah gedung pendidikan nonformal/kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan	2025
5.	Jumlah gedung PAUD yang tersedia	Dinas Pendidikan	2025
6.	Jumlah gedung PAUD yang layak	Dinas Pendidikan	2025
7.	Jumlah gedung PAUD yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan	2025
8.	Jumlah gedung PAUD yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan	2025
9.	Jumlah gedung PKBM	Dinas Pendidikan	2025
10.	Jumlah Gedung PKBM yang layak	Dinas Pendidikan	2025

11.	Jumlah gedung PKBM yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan	2025
12.	Jumlah gedung sekolah yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan	2025
13.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar	Dinas Pendidikan	2025
14.	Jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama	Dinas Pendidikan	2025
15.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Dinas Pendidikan	2025
16.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Dinas Pendidikan	2025
17.	Jumlah pendidik pada satuan PAUD yang tersedia	Dinas Pendidikan	2025
18.	Jumlah pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Dinas Pendidikan	2025
19.	Jumlah pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Dinas Pendidikan	2025
20.	Jumlah prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan	2025
21.	Jumlah prasarana pendidikan nonformal/kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan	2025
22.	Jumlah prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan	2025
23.	Jumlah prasarana pendidikan nonformal/kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan	2025
24.	jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan	Dinas Pendidikan	2025
25.	Jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan yang layak	Dinas Pendidikan	2025
26.	Jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan yang rusak sedang/hebat	Dinas Pendidikan	2025

27.	Jumlah rasio pendidik pada satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Dinas Pendidikan	2025
28.	Jumlah ruang guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan	2025
29.	Jumlah ruang kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan	2025
30.	Jumlah ruang kelas pendidikan nonformal/kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan	2025
31.	Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus diganti	Dinas Pendidikan	2025
32.	Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang masih baik	Dinas Pendidikan	2025
33.	Jumlah uang PAUD yang tidak memiliki mebel	Dinas Pendidikan	2025
34.	Jumlah ruang pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki mebel yang masih baik	Dinas Pendidikan	2025
35.	Jumlah satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan	Dinas Pendidikan	2025
36.	Jumlah satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi	Dinas Pendidikan	2025
37.	Jumlah satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah	Dinas Pendidikan	2025
38.	Jumlah satuan PAUD yang memiliki peralatan rumah tangga yang masih baik	Dinas Pendidikan	2025
39.	Jumlah satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa	Dinas Pendidikan	2025
40.	Jumlah satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan	Dinas Pendidikan	2025
41.	Jumlah satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah	Dinas Pendidikan	2025
42.	Jumlah satuan PAUD yang mengelola dana BOP	Dinas Pendidikan	2025

43.	Jumlah satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar	Dinas Pendidikan	2025
44.	Jumlah satuan PAUD yang siap dievaluasi	Dinas Pendidikan	2025
45.	Jumlah satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	Dinas Pendidikan	2025
46.	Jumlah satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	Dinas Pendidikan	2025
47.	Jumlah satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang telah dibutuhkan dalam penyelenggaraan	Dinas Pendidikan	2025
48.	Jumlah satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah	Dinas Pendidikan	2025
49.	Jumlah satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah	Dinas Pendidikan	2025
50.	Jumlah satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengelola dana BOP	Dinas Pendidikan	2025
51.	Jumlah satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar	Dinas Pendidikan	2025
52.	Jumlah satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	Dinas Pendidikan	2025
53.	Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos	Dinas Pendidikan	2025
54.	Jumlah siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	Dinas Pendidikan	2025
55.	Jumlah siswa pendidikan nonformal/kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	Dinas Pendidikan	2025

56.	Jumlah siswa PAUD yang membutuhkan perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan	2025
57.	Jumlah siswa PAUD yang menerima perlengkapan siswa PAUD	Dinas Pendidikan	2025
58.	Jumlah tenaga kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Dinas Pendidikan	2025
59.	Jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang berkualifikasi	Dinas Pendidikan	2025
60.	Jumlah tenaga kependidikan pada satuan PAUD	Dinas Pendidikan	2025
61.	Jumlah tenaga kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Dinas Pendidikan	2025
62.	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	2025
63.	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP pendidikan nonformal/kesetaraan	Dinas Pendidikan	2025
64.	Jumlah utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan	2025
65.	Jumlah utilitas pendidikan nonformal/kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Dinas Pendidikan	2025
66.	Jumlah utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan	2025
67.	Jumlah utilitas Pendidikan nonformal/kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Dinas Pendidikan	2025
68.	Jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan	Dinas Pendidikan	2025
69.	Jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang layak	Dinas Pendidikan	2025
70.	Jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang rusak sedang/berat	Dinas Pendidikan	2025

71.	Satuan pendidikan dayah yang terakreditasi C	Dinas Pendidikan	2025
72.	Jumlah SD yang dikelola oleh pihak pemerintah	Dinas Pendidikan	2025
73.	Jumlah SD yang dikelola oleh pihak swasta	Dinas Pendidikan	2025
74.	Jumlah SD negeri dan swasta	Dinas Pendidikan	2025
75.	Jumlah siswa pada jenjang SD yang dikelola oleh pihak pemerintah	Dinas Pendidikan	2025
76.	Jumlah siswa pada jenjang SD yang dikelola oleh pihak swasta	Dinas Pendidikan	2025
77.	Jumlah siswa pada jenjang SD yang dikelola oleh pihak pemerintah dan pihak swasta	Dinas Pendidikan	2025
78.	Jumlah siswa SD negeri berjenis kelamin laki-laki	Dinas Pendidikan	2025
79.	Jumlah siswa SD swasta berjenis kelamin laki-laki	Dinas Pendidikan	2025
80.	Jumlah siswa SD negeri dan swasta berjenis kelamin laki-laki	Dinas Pendidikan	2025
81.	Jumlah siswa SD negeri berjenis kelamin perempuan	Dinas Pendidikan	2025
82.	Jumlah siswa SD swasta berjenis kelamin perempuan	Dinas Pendidikan	2025
83.	Jumlah siswa SD negeri dan swasta berjenis kelamin perempuan	Dinas Pendidikan	2025
84.	Jumlah siswa kelas 1 pada SD negeri	Dinas Pendidikan	2025
85.	Jumlah siswa kelas 1 pada SD swasta	Dinas Pendidikan	2025
86.	Jumlah siswa kelas 1 pada SD negeri dan swasta	Dinas Pendidikan	2025
87.	Jumlah siswa kelas 2 pada SD negeri	Dinas Pendidikan	2025
88.	Jumlah siswa kelas 2 pada SD swasta	Dinas Pendidikan	2025
89.	Jumlah siswa kelas 2 pada SD negeri dan swasta	Dinas Pendidikan	2025

90.	Jumlah siswa kelas 3 pada SD negeri	Dinas Pendidikan	2025
91.	Jumlah siswa kelas 3 pada SD swasta	Dinas Pendidikan	2025
92.	Jumlah siswa kelas 3 pada SD negeri dan swasta	Dinas Pendidikan	2025
93.	Jumlah siswa kelas 4 pada SD negeri	Dinas Pendidikan	2025
94.	Jumlah siswa kelas 4 pada SD swasta	Dinas Pendidikan	2025
95.	Jumlah siswa kelas 4 pada SD negeri dan swasta	Dinas Pendidikan	2025
96.	Jumlah siswa kelas 5 pada SD negeri	Dinas Pendidikan	2025
97.	Jumlah siswa kelas 5 pada SD swasta	Dinas Pendidikan	2025
98.	Jumlah siswa kelas 5 pada SD negeri dan swasta	Dinas Pendidikan	2025
99.	Jumlah siswa kelas 6 pada SD negeri	Dinas Pendidikan	2025
100.	Jumlah siswa kelas 6 pada SD swasta	Dinas Pendidikan	2025
101.	Jumlah siswa kelas 6 pada SD negeri dan swasta	Dinas Pendidikan	2025
102.	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	2025
103.	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah dibawah S1 pada Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	2025
104.	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	2025
105.	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	2025
106.	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	2025
107.	Jumlah sekolah Menengah Pertama Negeri	Dinas Pendidikan	2025
108.	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta	Dinas Pendidikan	2025

109.	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	2025
110.	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasional	Dinas Kesehatan	2025
111.	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Dinas Kesehatan	2025
112.	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin operasional	Dinas Kesehatan	2025
113.	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Dinas Kesehatan	2025
114.	Jumlah gudang umum	Dinas Kesehatan	2025
115.	Jumlah ibu bersalin	Dinas Kesehatan	2025
116.	Jumlah ibu hamil	Dinas Kesehatan	2025
117.	Jumlah ICCU/ICVCU	Dinas Kesehatan	2025
118.	Jumlah ICU	Dinas Kesehatan	2025
119.	Jumlah kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	Dinas Kesehatan	2025
120.	Jumlah keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Dinas Kesehatan	2025
121.	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	Dinas Kesehatan	2025
122.	Jumlah NICU	Dinas Kesehatan	2025
123.	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK)	Dinas Kesehatan	2025
124.	Jumlah orang kecanduan NAPZA	Dinas Kesehatan	2025
125.	Jumlah orang terduga menderita HIV	Dinas Kesehatan	2025

126.	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Dinas Kesehatan	2025
127.	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dinas Kesehatan	2025
128.	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA	Dinas Kesehatan	2025
129.	Jumlah pengolahan limbah	Dinas Kesehatan	2025
130.	Jumlah penyalahguna NAPZA	Dinas Kesehatan	2025
131.	Jumlah peralatan di ruang CSSD	Dinas Kesehatan	2025
132.	Jumlah peralatan di ruang dapur/gizi	Dinas Kesehatan	2025
133.	Jumlah peralatan di ruang farmasi	Dinas Kesehatan	2025
134.	Jumlah peralatan di ruang gawat darurat	Dinas Kesehatan	2025
135.	Jumlah peralatan di ruang kantor dan administrasi	Dinas Kesehatan	2025
136.	Jumlah peralatan di ruang laboratorium	Dinas Kesehatan	2025
137.	Jumlah peralatan di ruang operasi	Dinas Kesehatan	2025
138.	Jumlah peralatan di ruang radiologi	Dinas Kesehatan	2025
139.	Jumlah peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	Dinas Kesehatan	2025
140.	Jumlah peralatan di ruang rekam	Dinas Kesehatan	2025
141.	Jumlah peralatan penanggulangan kebakaran	Dinas Kesehatan	2025
142.	Jumlah peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	Dinas Kesehatan	2025
143.	Jumlah PICU	Dinas Kesehatan	2025
144.	Jumlah prasarana di fasyankes	Dinas Kesehatan	2025

145.	Jumlah prasarana fasyankes	Dinas Kesehatan	2025
146.	Jumlah Public Safety Center (PSC 119)	Dinas Kesehatan	2025
147.	Jumlah puskesmas	Dinas Kesehatan	2025
148.	Jumlah ruang administrasi	Dinas Kesehatan	2025
149.	Jumlah ruang administrasi dan manajemen	Dinas Kesehatan	2025
150.	Jumlah ruang ASI	Dinas Kesehatan	2025
151.	Jumlah ruang bank darah rumah sakit	Dinas Kesehatan	2025
152.	Jumlah ruang cuci linen	Dinas Kesehatan	2025
153.	Jumlah ruang farmasi	Dinas Kesehatan	2025
154.	Jumlah ruang gawat darurat	Dinas Kesehatan	2025
155.	Jumlah ruang gizi	Dinas Kesehatan	2025
156.	Jumlah ruang jaga petugas	Dinas Kesehatan	2025
157.	Jumlah ruang jenazah	Dinas Kesehatan	2025
158.	Jumlah ruang kantor untuk karyawan	Dinas Kesehatan	2025
159.	Jumlah ruang kepala puskesmas	Dinas Kesehatan	2025
160.	Jumlah ruang kesehatan gigi dan mulut	Dinas Kesehatan	2025
161.	Jumlah ruang kesehatan ibu dan KB	Dinas Kesehatan	2025
162.	Jumlah ruang laboratorium	Dinas Kesehatan	2025
163.	Jumlah ruang laundry	Dinas Kesehatan	2025
164.	Jumlah ruang operasi	Dinas Kesehatan	2025
165.	Jumlah ruang parkir	Dinas Kesehatan	2025
166.	Jumlah ruang pemeliharaan sarpras	Dinas Kesehatan	2025

167.	Jumlah ruang pendaftaran dan rekam medik	Dinas Kesehatan	2025
168.	Jumlah ruang pengolahan air bersih, limbah dan sanitas	Dinas Kesehatan	2025
169.	Jumlah ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)	Dinas Kesehatan	2025
170.	Jumlah ruang persalinan	Dinas Kesehatan	2025
171.	Jumlah ruang radiologi	Dinas Kesehatan	2025
172.	Jumlah ruang rapat/diskusi	Dinas Kesehatan	2025
173.	Jumlah ruang rawat inap	Dinas Kesehatan	2025
174.	Jumlah ruang rawat jalan	Dinas Kesehatan	2025
175.	Jumlah ruang rawat pasca persalinan	Dinas Kesehatan	2025
176.	Jumlah ruang rehabilitasi medik	Dinas Kesehatan	2025
177.	Jumlah ruang rekam medis	Dinas Kesehatan	2025
178.	Jumlah ruang sterilisasi	Dinas Kesehatan	2025
179.	Jumlah ruang Tindakan dan gawat darurat	Dinas Kesehatan	2025
180.	Jumlah ruang tunggu	Dinas Kesehatan	2025
181.	Jumlah rumah dinas nakes	Dinas Kesehatan	2025
182.	Jumlah rumah sakit kelas B	Dinas Kesehatan	2025
183.	Jumlah rumah sakit kelas B yang memiliki izin operasional	Dinas Kesehatan	2025
184.	Jumlah sarana di fasyankes	Dinas Kesehatan	2025
185.	Jumlah sarana fasyankes	Dinas Kesehatan	2025
186.	Jumlah tempat tidur rumah sakit	Dinas Kesehatan	2025
187.	Jumlah tenaga apotek	Dinas Kesehatan	2025
188.	Jumlah tenaga gizi	Dinas Kesehatan	2025

189.	Jumlah tenaga kebidanan	Dinas Kesehatan	2025
190.	Jumlah tenaga keperawatan	Dinas Kesehatan	2025
191.	Jumlah tenaga kesehatan lainnya	Dinas Kesehatan	2025
192.	Jumlah tenaga kesehatan lingkungan	Dinas Kesehatan	2025
193.	Jumlah tenaga kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	2025
194.	Jumlah tenaga keterampilan fisik	Dinas Kesehatan	2025
195.	Jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional (RMC)	Dinas Kesehatan	2025
196.	Jumlah penderita diabetes melitus	Dinas Kesehatan	2025
197.	Jumlah penderita hipertensi	Dinas Kesehatan	2025
198.	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik	Dinas Kesehatan	2025
199.	Jumlah pengolahan limbah	Dinas Kesehatan	2025
200.	Jumlah unit pemeliharaan regional (RMC)	Dinas Kesehatan	2025
201.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	Dinas Pariwisata	2025
202.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Dinas Pariwisata	2025
203.	Tingkat hunian akomodasi	Dinas Pariwisata	2025
204.	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Dinas Pariwisata	2025
205.	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Dinas Pariwisata	2025
206.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Dinas Pariwisata	2025
207.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Dinas Pariwisata	2025

208.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Dinas Pariwisata	2025
209.	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Dinas Pariwisata	2025
210.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata didalam negeri	Dinas Pariwisata	2025
211.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Dinas Pariwisata	2025
212.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Dinas Pariwisata	2025
213.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Dinas Pariwisata	2025
214.	Jumlah grup kesenian	Dinas Pariwisata	2025
215.	Jumlah gedung kesenian	Dinas Pariwisata	2025
216.	Museum	Dinas Pariwisata	2025
217.	Pusat kebudayaan	Dinas Pariwisata	2025
218.	Kunjangan wisata	Dinas Pariwisata	2025
219.	Koleksi museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025
220.	Laporan pengembangan bahasa sastra	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025
221.	Objek cagar budaya yang dikembangkan	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025
222.	Objek cagar budaya yang dilindungi	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025
223.	Objek cagar budaya yang dimanfaatkan	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025
224.	Objek cagar budaya yang ditetapkan	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025
225.	Objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025
226.	Objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pengembangan	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025

227.	Objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025
228.	Objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan perlindungan	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025
229.	Peserta pelatihan peradilan adat	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025
230.	Sarana dan prasarana museum yang direvitalisasi	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025
231.	Sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025
232.	Sumber daya manusia kebudayaan	Dinas pendidikan dan kebudayaan	2025
233.	Jumlah kantor cabang koperasi simpan pinjam	Dinas Koperasi dan UKM	2025
234.	Jumlah kantor kas koperasi simpan pinjam	Dinas Koperasi dan UKM	2025
235.	Jumlah kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi dan UKM	2025
236.	Jumlah koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Dinas Koperasi dan UKM	2025
237.	Jumlah koperasi yang akuntabilitas dan memberi manfaat kepada anggota UKM dan masyarakat	Dinas Koperasi dan UKM	2025
238.	Jumlah koperasi yang diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	2025
239.	jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	Dinas Koperasi dan UKM	2025
240.	Jumlah koperasi yang telah dilakukan kesehatan koperasi kewenangan kabupaten/kota	Dinas Koperasi dan UKM	2025
241.	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan akuntabilitas koperasi	Dinas Koperasi dan UKM	2025
242.	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Dinas Koperasi dan UKM	2025

243.	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan ketangguhan koperasi kewenangan kabupaten/kota	Dinas Koperasi dan UKM	2025
244.	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, koperasi kewenangan kabupaten/kota	Dinas Koperasi dan UKM	2025
245.	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kemandirian koperasi kewenangan kabupaten/kota	Dinas Koperasi dan UKM	2025
246.	Jumlah pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam	Dinas Koperasi dan UKM	2025
247.	Jumlah pembukaan kantor cabang untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi dan UKM	2025
248.	Jumlah pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam	Dinas Koperasi dan UKM	2025
249.	Jumlah restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Dinas Koperasi dan UKM	2025
250.	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Dinas Koperasi dan UKM	2025
251.	Jumlah unit usaha mikro yang menjadi usaha kecil dalam pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Dinas Koperasi dan UKM	2025
252.	Jumlah unit usaha mikro yang menjadi usaha kecil dalam pengembangan SDM	Dinas Koperasi dan UKM	2025
253.	Jumlah unit usaha mikro yang menjadi usaha kecil dalam pengembangan desain dan teknologi	Dinas Koperasi dan UKM	2025
254.	Jumlah unit usaha mikro yang menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan	Dinas Koperasi dan UKM	2025
255.	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan	Dinas Koperasi dan UKM	2025

256.	Jumlah unit usaha yang memiliki akses pasar, akses pembiayaan	Dinas Koperasi dan UKM	2025
257.	Jumlah unit usaha yang memiliki akses pembiayaan	Dinas Koperasi dan UKM	2025
258.	Jumlah unit usaha yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Dinas Koperasi dan UKM	2025
259.	Jumlah unit usaha yang memiliki akses pasar	Dinas Koperasi dan UKM	2025
260.	Jumlah unit usaha yang memiliki penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi	Dinas Koperasi dan UKM	2025
261.	Jumlah unit usaha yang memiliki restrukturisasi usaha	Dinas Koperasi dan UKM	2025
262.	Jumlah unit usaha yang produktif	Dinas Koperasi dan UKM	2025
263.	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah	Dinas Koperasi dan UKM	2025
264.	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Dinas Koperasi dan UKM	2025
265.	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Dinas Koperasi dan UKM	2025
266.	Jumlah unit mikro yang telah mendapatkan perizinan	Dinas Koperasi dan UKM	2025
267.	Jumlah usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dinas Koperasi dan UKM	2025
268.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
269.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
270.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
271.	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
272.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025

273.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
274.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
275.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan danatau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
276.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
277.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
278.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
279.	Rasio perpustakaan per 1000 penduduk	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
280.	Jumlah perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
281.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
282.	Jumlah tenaga pustakawan, teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
283.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
284.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
285.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
286.	Persentase jumlah arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
287.	Data base arsiparis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2025
288.	Anak terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Dinas Sosial	2025
289.	Anak terlantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Dinas Sosial	2025
290.	Anak terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Dinas Sosial	2025

291.	Anak terlantar yang mendapat layanan rujukan	Dinas Sosial	2025
292.	Anak terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Dinas Sosial	2025
293.	Anak-anak terlantar yang dijangkau	Dinas Sosial	2025
294.	Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan	Dinas Sosial	2025
295.	Fakir miskin	Dinas Sosial	2025
296.	Gelandangan dan pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan	Dinas Sosial	2025
297.	Gelandangan dan pengemis yang mendapat layanan rujukan	Dinas Sosial	2025
298.	Gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan	Dinas Sosial	2025
299.	Gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Dinas Sosial	2025
300.	Gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Dinas Sosial	2025
301.	Gelandangan dan pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan standar gizi minimal	Dinas Sosial	2025
302.	Gelandangan dan pengemis yang menerima kebutuhan sandang	Dinas Sosial	2025
303.	Keluarga pada KAT	Dinas Sosial	2025
304.	Keluarga penerima manfaat (KPM)	Dinas Sosial	2025
305.	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Dinas Sosial	2025
306.	Korban bencana yang mendapatkan kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Dinas Sosial	2025

307.	Lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Dinas Sosial	2025
308.	Lanjut usia terlantar yang mendapat akses ke kesehatan dasar	Dinas Sosial	2025
309.	Lanjut usia terlantar yang mendapat fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Dinas Sosial	2025
310.	Lanjut usia terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Dinas Sosial	2025
311.	Lanjut usia terlantar yang mendapat layanan rujukan	Dinas Sosial	2025
312.	Lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Dinas Sosial	2025
313.	Lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Dinas Sosial	2025
314.	Lanjut usia terlantar yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga	Dinas Sosial	2025
315.	Lembaga kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	2025
316.	Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Dinas Sosial	2025
317.	Makam pahlawan nasional	Dinas Sosial	2025
318.	Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Dinas Sosial	2025
319.	Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Dinas Sosial	2025
320.	Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial	Dinas Sosial	2025
321.	Pekerja sosial masyarakat	Dinas Sosial	2025

322.	Pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Dinas Sosial	2025
323.	Pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial	Dinas Sosial	2025
324.	Pelaksanaan pengamanan taman makam pahlawan nasional	Dinas Sosial	2025
325.	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Dinas Sosial	2025
326.	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat permakanan sesuai dengan standar gizi minimal	Dinas Sosial	2025
327.	Penyandang disabilitas terlantar yang menerima kebutuhan sandang	Dinas Sosial	2025
328.	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Dinas Sosial	2025
329.	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat layanan rujukan	Dinas Sosial	2025
330.	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Dinas Sosial	2025
331.	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Dinas Sosial	2025
332.	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga	Dinas Sosial	2025
333.	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu	Dinas Sosial	2025

334.	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	Dinas Sosial	2025
335.	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kedaruratan	Dinas Sosial	2025
336.	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Dinas Sosial	2025
337.	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal	Dinas Sosial	2025
338.	Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan rujukan	Dinas Sosial	2025
339.	Sarana dan prasarana di taman makam pahlawan yang direhabilitasi	Dinas Sosial	2025
340.	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	Dinas Sosial	2025
341.	Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	Dinas Sosial	2025
342.	Tarunan siaga bencana	Dinas Sosial	2025
343.	Jumlah KK transmigrasi yang dibina	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2025
344.	Calon transmigran terdaftar dan terseleksi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2025

345.	Calon transmigran atau transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2025
346.	Calon transmigrasi atau transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2025
347.	Calon transmigrasi yang mendapat penyuluhan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2025
348.	Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2025
349.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
350.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di kabupaten/kota	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
351.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan evakuasi	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
352.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2009 tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
353.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
354.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025

355.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
356.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2025
357.	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2025
358.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah Kab/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2025
359.	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2025
360.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2025
361.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2025
362.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2025
363.	Jumlah kelompok pedagang yang di bina	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2025
364.	Jumlah pengrajin kelompok yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2025
365.	Pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi	Dinas Perikanan	2025
366.	Pembudidayaan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Dinas Perikanan	2025
367.	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	Dinas Perikanan	2025

368.	Jumlah perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil	Dinas Perikanan	2025
369.	Jumlah perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran	Dinas Perikanan	2025
370.	Jumlah alat penangkapan ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Perikanan	2025
371.	Jumlah alat bantu penangkapan ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Perikanan	2025
372.	Jumlah kelompok pembudidayaan ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	Dinas Perikanan	2025
373.	Jumlah dan kualitas penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau tidak punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2025
374.	Jumlah perusahaan yang mendaftarkan pekerjaannya program jaminan sosial ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2025

375.	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2025
376.	Aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
377.	Aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi analis dalam pencegahan kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
378.	Aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam penanggulangan kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
379.	Aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
380.	Korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik evakuasi korban bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
381.	Korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan korban bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
382.	Korban yang berhasil ditolong per jenis kejadian bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
383.	Orang yang mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
384.	Orang yang mendapatkan sosialisasi rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025

	penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya		
385.	Warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan kebakaran setiap tahunnya	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
386.	Warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
387.	Warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2025
388.	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
389.	Sarana pertanian yang diberikan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
390.	Prasarana pertanian yang digunakan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
391.	Luas total lahan pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
392.	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
393.	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
394.	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025

395.	Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor hortikultura	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
396.	Jumlah produksi padi biofortifikasi	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
397.	Luas panen komoditas pertanian sektor hortikultura	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
398.	Luas areal komoditas pertanian sektor perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
399.	Luas panen komoditas pertanian sektor tanaman pangan (kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau & kacang tanah)	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
400.	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor hortikultura	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
401.	Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
402.	Jumlah petani pekebun perkebunan rakyat komoditas pertanian sektor perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Pertanahan	2025
403.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2025
404.	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2025
405.	Jumlah produksi komoditas peternakan atau pangan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2025
406.	Jumlah produksi daging sapi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2025
407.	Jumlah produksi daging kerbau	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2025
408.	Jumlah produksi daging kambing	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2025

409.	Jumlah produksi daging domba	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2025
410.	Jumlah produksi daging ayam	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2025
411.	Jumlah produksi daging itik	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2025
412.	Jumlah produksi daging babi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2025
413.	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Dinas Ketahanan Pangan	2025
414.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	2025
415.	Ketersediaan pangan utama	Dinas Ketahanan Pangan	2025
416.	Jumlah eksisting infrastruktur cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan	2025
417.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Dinas Ketahanan Pangan	2025
418.	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang terpelihara	Dinas Ketahanan Pangan	2025
419.	Jumlah penyaluran cadangan pangan pemerintah	Dinas Ketahanan Pangan	2025
420.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	2025
421.	Indeks kualitas air	Dinas Lingkungan Hidup	2025
422.	Indeks kualitas udara	Dinas Lingkungan Hidup	2025
423.	Indeks kualitas tutupan lahan	Dinas Lingkungan Hidup	2025
424.	Jumlah data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup	2025
425.	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup	2025

426.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Dinas Lingkungan Hidup	2025
427.	Persentase cakupan area pelayanan	Dinas Lingkungan Hidup	2025
428.	Persentase penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	2025
429.	Volume sampah yang ditangani ton/tahun	Dinas Lingkungan Hidup	2025
430.	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
431.	SDM anggota BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
432.	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
433.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
434.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
435.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
436.	Jumlah kantor pemerintah desa yang baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
437.	Jumlah seluruh pemerintah desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
438.	Jumlah kelompok binaan LPM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
439.	Jumlah LPM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
440.	Persentase LPM berprestasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
441.	Jumlah kelompok binaan PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
442.	Jumlah PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
443.	Jumlah PKK aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025
444.	Jumlah posyandu aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2025

445.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
446.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
447.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
448.	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
449.	Jumlah seluruh PMA/PMDN	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
450.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
451.	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
452.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
453.	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025

454.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
455.	Jumlah media massa (cetak,elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
456.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
457.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
458.	jumlah kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
459.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
460.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025

461.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
462.	Jumlah KDRT	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
463.	Jumlah pekerja usia 15 tahun keatas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
464.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
465.	Jumlah akseptor KB	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
466.	Jumlah pasangan usia subur	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2025
467.	Realisasi pendapatan pajak daerah	Badan Pendapatan Daerah	2025
468.	Realisasi pendapatan retribusi daerah	Badan Pendapatan Daerah	2025
469.	Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Badan Pendapatan Daerah	2025
470.	Realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah	Badan Pendapatan Daerah	2025

471.	Realisasi retribusi pelayanan kesehatan	Badan Pendapatan Daerah	2025
472.	Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Badan Pendapatan Daerah	2025
473.	Realisasi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus	Badan Pendapatan Daerah	2025
474.	Realisasi retribusi uji laboratorium	Badan Pendapatan Daerah	2025
475.	Realisasi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	Badan Pendapatan Daerah	2025
476.	Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah	Badan Pendapatan Daerah	2025
477.	Realisasi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)	Badan Pendapatan Daerah	2025
478.	Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	Badan Pendapatan Daerah	2025
479.	Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor	Badan Pendapatan Daerah	2025
480.	Realisasi retribusi terminal	Badan Pendapatan Daerah	2025
481.	Realisasi retribusi tempat khusus parkir	Badan Pendapatan Daerah	2025
482.	Realisasi retribusi pelayanan kepelabuhan	Badan Pendapatan Daerah	2025
483.	Realisasi retribusi penyeberangan di atas air	Badan Pendapatan Daerah	2025
484.	Realisasi retribusi izin trayek	Badan Pendapatan Daerah	2025
485.	Realisasi retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa	Badan Pendapatan Daerah	2025
486.	Realisasi retribusi pemakaian daerah penyewaan & tanah/bangunan	Badan Pendapatan Daerah	2025
487.	Realisasi retribusi rumah potong hewan	Badan Pendapatan Daerah	2025
488.	Realisasi retribusi izin usaha perikanan	Badan Pendapatan Daerah	2025
489.	Realisasi retribusi tempat pelelangan	Badan Pendapatan Daerah	2025
490.	Realisasi retribusi pelayanan pasar	Badan Pendapatan Daerah	2025

491.	Realisasi retribusi izin tempat penjualan minuman ber alkohol	Badan Pendapatan Daerah	2025
492.	Realisasi retribusi tera/tera ulang	Badan Pendapatan Daerah	2025
493.	Realisasi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Badan Pendapatan Daerah	2025
494.	Realisasi retribusi pengisian alat pemadam kebakaran	Badan Pendapatan Daerah	2025
495.	Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga (DTW Pila Weanto Salodik)	Badan Pendapatan Daerah	2025
496.	Realisasi retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA)	Badan Pendapatan Daerah	2025
497.	Realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi	Badan Pendapatan Daerah	2025
498.	Realisasi sewa videotron dan space iklan	Badan Pendapatan Daerah	2025
499.	Realisasi retribusi penjualan produksi usaha daerah	Badan Pendapatan Daerah	2025
500.	Realisasi retribusi izin UU gangguan (HO)	Badan Pendapatan Daerah	2025
501.	Realisasi pendapatan dana bagi hasil (DBH)	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	2025
502.	Realisasi pendapatan dana alokasi umum (DAU)	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	2025
503.	Realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) fisik	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	2025
504.	Realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) non fisik	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	2025
505.	Realisasi dana pendapatan hibah	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	2025

506.	Realisasi dana lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	2025
------	------------------------	--	------

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Banggai



LESMANA P. KULAB

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19810721 200312 1 004